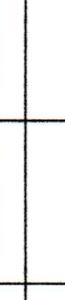
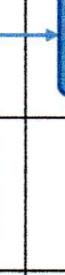
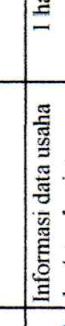
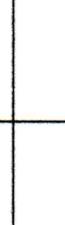
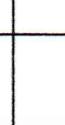
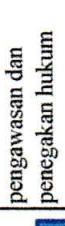


Nomor SOP	: 061/1477/SOP-DLH/2020		
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2020		
Tanggal Revisi	: -		
Tanggal Efektif	: 02 Januari 2020		
Disahkan oleh	<p><b>Kepala Dinas Lingkungan Hidup</b>  <b>Kabupaten Buleleng</b></p>  		
<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Seksi Penegakan Hukum Lingkungan</b></p>			
		<b>Nama SOP</b>	<b>: Penegakan Hukum Lingkungan</b>



<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>		
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami mekanisme pelaksanaan tugas Tim</li> <li>Memahami tugas dan fungsi OPD</li> <li>Memahami tahapan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum</li> </ol>		
<b>Keterkaitan SOP</b>	<b>Peralatan/ Perlengkapan</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer/Printer/Kamera</li> <li>ATK</li> <li>Berita Acara</li> </ol>		
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dirangkum menjadi laporan hasil pengawasan dan penegakan hukum</li> <li>Berita Acara sebagai tindak lanjut pengawasan dan sebagai dasar dalam melakukan penegakan hukum disimpan dalam bentuk hardcopy</li> </ol>		

## SOP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Kadis	Kabid	Kasi	Staf (FU)	Kelengkapan	Waktu		
1	Kepala Dinas memerintahkan kepada Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup untuk melakukan pendataan terhadap usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Buleleng					Informasi data usaha dan/atau kegiatan	1 hari	Register pengawasan	
2	Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup selanjutnya memerintahkan Kasi Penegakan Hukum Lingkungan untuk menyusun data usaha dan/kegiatan untuk kemudian dibuatkan jadwal pengawasan					Informasi data usaha dan/atau kegiatan	1 hari	Register pengawasan	
3	Kasi Penegakan hukum Lingkungan kemudian memerintahkan staf untuk mendata usaha dan/kegiatan yang ada di Kabupaten Buleleng dan selanjutnya untuk dibuatkan jadwal pengawasan lebih lanjut					Informasi data usaha dan/atau kegiatan	1 hari	Register pengawasan	
4	Staf Bidang Penaatan kemudian mendata usaha dan/kegiatan yang ada di kabupaten buleleng, kemudian direkap, selanjutnya dibuatkan jadwal pengawasan dan kemudian diserahkan kepada Kasi Penegakan Hukum Lingkungan					Informasi pengawasan	1 hari	Data Pengawasan	
5	Kasi Penegakan Hukum Lingkungan menyampaikan data informasi terkait usaha dan/kegiatan beserta jadwal pengawasan kepada Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas yang selanjutnya dilakukan pengawasan ke lapangan terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut					Y <sub>a</sub>	Informasi pengawasan	3 hari	Data Pengawasan
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup menugaskan Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup beserta Kasi Penegakan Hukum Lingkungan untuk melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan kemudian apabila terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ijin yang dimiliki maka dilakukan penegakan hukum terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku						Data hasil pengawasan dan penegakan hukum	3 hari	Inventarisasi pengawasan dan Penegakan Hukum
7	Kasi Penegakan Hukum Lingkungan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan penegakan hukum kepada Kepala Dinas dengan sepengetahuan dari Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan kemudian Kasi Penegakan Hukum Lingkungan menyerahterikan dokumen laporan tersebut kepada staf untuk selanjutnya di arsip						Data hasil pengawasan dan penegakan hukum	1 hari	Inventarisasi pengawasan dan Penegakan Hukum